

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cross, Rupert, 1975, *The English Sentencing System*, Butter worths, London.
- Hallevy, Gabriella, 2013, *The Right to be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, Springer, UK.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, Barda Nawawi Arief 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Strang, Heather & John Braithwaite (Editor), 2000, *Restorative Justice:Philosopy To Practice*, Asghate Darmouth, Aldershot-Butlington USA-Singapore-Sydney.

Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

C. Sumber Lain

Alfons, Matius, “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Versi 15 September 2019”, reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RUU-KUHP-BUKU-KESATU-15-September-2019.docx, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, diakses pada tanggal 18 September 2019.

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, “Facts for Families: Child Sexual Abuse”, *American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, Vol. 9, No. 3, 2011.

Budiman, Aditya, “Jokowi Terbitkan PERPU Kebiri : Inilah Isi Lengkapnya”, https://nasional.tempo.co/read/774280/jokowi-terbitkan-perpu-kebiri-inilah-isi-lengkapnya?page_num=3, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, 2016, “Menguji Euforia Kebiri. Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia”, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta Selatan.



- Epifania, Elsa Martha, 2018, “Eksistensi Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fitria, Lina, “Komnas PA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual”, <https://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual>, Oke Zone, diakses pada tanggal 02 September 2019.
- Gabrillin, Abba, “Meski Telah Disetujui, Penetapan Hukuman Kebiri Perlu Melalui Kajian Ilmiah”, http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukum.an.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiah_ diakses pada tanggal 02 November 2019.
- Hanifah, Syifa, “Ini Sejarah KUHP, Produk Hukum Peninggalan Belanda yang Digunakan Indonesia”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalan-belanda-yang-digunakan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.
- Hardjo, Yuliardi, “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu”, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses pada tanggal 01 September 2019.
- Hikmawati, Puteri, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, Vol. 2, No.2, November 2011.
- Institute Criminal Justice Reform, “Hukum Kebiri: Indonesia Latah Atau Tanpa Solusi?”, <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada tanggal 10 November 2019.
- Ismail Akbar, 2017, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pelaksanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Munggim, Ngabdul, 2015, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Noya, Allert Benedicto Ieuan, “Selain Sehat Fisik, Kesehatan Mental Juga Penting Diperhatikan”, <https://www.alodokter.com/selain-sehat-fisik-kesehatan-mental-juga-penting-diperhatikan>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

- Putra, Putu Merta Surya, “KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak”, <http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksualanak>, diakses pada tanggal 11 November 2019.
- Rachmaningtyas, Ayu, “Tugas Dokter Menyembuhkan, Alasan IDI Tolak Hukuman Kebiri Dinilai Wajar”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/tugas.dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar?page=all>, diakses pada tanggal 25 September 2019.
- Rusdystina, Adinda, “Apa Itu Kebiri Kimia dan Bagaimana Prosesnya?”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses pada tanggal 06 September 2019.
- Sahbani, Agus, “Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019/.
- Soetedjo, Julitasari Sundorso dan Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Hukuman Kebiri”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Juni 2018.
- Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, 2019, “Diskursus Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syarifah, Fitri, “Biaya Obat Kebiri Mahal, Pemerintah Pakai yang Mana?”, <https://www.liputan6.com/health/read/2516548/biaya-obat-kebiri-mahal-pemerintah-pakai-yang-mana>, diakses pada tanggal 05 November 2019.
- Tashandra, Nabilla, “Hukuman Kebiri Dikhawatirkan Salah Sasaran dan Jadi Bumerang”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang?page=all>, diakses pada tanggal 01 November 2019.
- Tashandra, Nabilla, “Psikolog UI Sebut Hukuman Kebiri Bisa Salah Arah”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20530221/Psikolog.UI.Sebut.Hukuman.Kebiri.Bisa.Sa>, diakses pada tanggal 01 November 2019.
- World Medical Assosiation, “WMA Declaration of Tokyo. Guidelines for Physicians Concerning Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment”, <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-tokyo->



[guidelines-for-physicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-in-relation-to-detention-and-imprisonment/](#), diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

Yani, Fitri, 2017, “Analisi Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.